

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

ANDRE RIDHO ILLAHI

Pendataan penduduk merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Menyadari hal tersebut, pemerintah Indonesia juga melakukan pendataan dengan mewajibkan masyarakat yang berusia di atas 17 tahun untuk membuat KTP-el sedangkan untuk masyarakat yang berusia di bawah 17 tahun Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Tanda Penduduk. sebagai pemenuhan hak anak untuk memperoleh identitas yang sah dan telah terintegrasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) serta mewajibkan anak-anak di seluruh Indonesia untuk membuat kartu identitas berupa KIA yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Bandar Lampung sebagai salah satu pelaksana kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan pembuatan kartu identitas anak di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan teori untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi menurut Charles O. Jones, yaitu dengan melihat bagaimana hal itu diorganisasikan, diinterpretasikan dan diaplikasikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan observasi serta menggunakan teknik analisis data dengan penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembuatan kartu identitas anak di Kota Bandar Lampung yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat faktor yang menghambat implementasi seperti kurangnya sosialisasi.

Kata Kunci : Implementasi, Kartu Identitas Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF MAKING CHILDREN'S IDENTITY CARDS IN BANDAR LAMPUNG CITY

By

ANDRE RIDHO ILLAHI

Population data collection is one of the rights that must be fulfilled by a country. Realizing this, the Indonesian government also conducted data collection by requiring people over the age of 17 to produce an e-KTP, while for people under 17 the Ministry of Home Affairs has issued Permendagri No. 2 of 2016 concerning Identity Cards. as a fulfillment of children's rights to obtain a legal identity and has integrated the population administration information system (SIAK) and requires children throughout Indonesia to make an identity card in the form of MCH which is carried out by the Disdukcapil of Bandar Lampung City as one of the implementers of the policy. This study aims to describe how the implementation of the policy of making child identity cards in Bandar Lampung City. This study uses theory to measure the level of success of implementation according to Charles O. Jones, namely by looking at how it is organized, interpreted and applied. This type of research is descriptive research with a qualitative approach using data collection techniques with interviews, documentation and observation and using data analysis techniques with data presentation, data reduction, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of the policy of making child identity cards in Bandar Lampung City which has been carried out by the Department of Population and Civil Registry of Bandar Lampung City has been going well but there are still factors that hinder implementation such as lack of socialization.

Key words: Implementation, Child's Identity Card, Department of Population and Civil Registration